

PENGUATAN LEMBAGA PENGELOLA AIR DI RW 11 DESA CILAYUNG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Desi Yunita¹ dan Achadiyani²

¹Program Studi Sosiologi/Universitas Padjadjaran

²Program Studi Kedokteran/Universitas Padjadjaran

E-mai: desi.yunita@unpad.ac.id

ABSTRAK. Kontinuitas suplai air bersih sangatlah penting sebagai kebutuhan vital bagi masyarakat. Salah satu cara yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih adalah dengan memanfaatkan mata air yang ada secara bersama-sama sebagai *common property*. Banyaknya masyarakat yang menjadi pemanfaat mengharuskan dilakukannya pengaturan suplai air bersih, sehingga masyarakat harus menyediakan penampungan agar air mencukupi untuk kebutuhan satu hari ketika mendapat giliran menerima suplai. Kegiatan ini memberikan solusi dalam mengatasi kelangkaan air dengan mendorong dibangunnya penampung air luberan dari penampungan yang telah ada ketika air tidak didistribusikan pada malam hari, dengan begitu jalur distribusi menjadi semakin pendek, dan masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak pasokan air. Kegiatan ini juga mendorong penguatan lembaga pengelola air ditingkat RW. Dengan pengelolaan air yang baik dan adanya iuran pengelolaan sebagai insentif sehingga dapat dijadikan modal dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini telah memberikan alternatif solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta mendorong kreativitas kelembagaan karang taruna sebagai pengelolaa air.

Kata kunci: Air bersih, pemanfaat, masyarakat

THE DEVELOPMENT OF WATER MANAGEMENT IN RW 11 CILAYUNG VILLAGE JATINANGOR SUB-DISTRICT SUMEDANG DISTRICT

ABSTRACT. *The continuity of the supply of clean water is very important as a vital need for society. One of the ways developed by the community to obtain clean water supply is by utilizing the existing spring together as a common property. The large number of people, who utilize the water source, requires the arrangement of water distribution. To meet the daily need for water is very important for the community to provide water reservoirs. This activity provides a solution to overcome water scarcity by encouraging the construction of water reservoirs from the existing reservoirs when water is not distributed at night, thus the distribution path becomes shorter, and the community can get more water supplies. This activity also encourages the strengthening of water management institutions at RW level. This activity also encourages the strengthening of water management institutions at RW level. With good water management and the existence of management fee as an incentive so that can be used as capital in community empowerment. This activity has provided an alternative solution for the community in fulfilling clean water needs, as well as encouraging the institutional creativity of youth as a water manager.*

Key words: *clean water, beneficiaries, community*

PENDAHULUAN

Fakta bahwa air berpotensi memunculkan ketegangan adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Apakah itu karena penguasaan sepihak oleh kelompok masyarakat tertentu, atau karena munculnya ketidakadilan distribusi air. Selain itu beberapa faktor yang menjadi pendorong munculnya ketegangan diantaranya adalah perubahan iklim, kelangkaan air secara fisik maupun ekonomis, pengelolaan ekonomi dan praktek-praktek pembangunan yang tidak berkelanjutan, perdagangan makanan global, serta kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia seperti pertambangan, industri, privatisasi sumber air, pencemaran air, dan perdagangan air.

Dewasa ini Indonesia juga mengalami persoalan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan tersebut diantaranya adalah perilaku yang tidak ramah pada lingkungan sungai sehingga sungai tidak bisa dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

juga karena disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang menuntut dibutuhkannya pemukiman yang berakibat pada terjadinya pengurangan daerah resapan air karena beralih fungsi menjadi pemukiman tersebut.

Desa-desanya di Jawa Barat umumnya mengandalkan kebutuhan air bersihnya dari sumber-sumber mata air pegunungan yang dimanfaatkan secara bersama sebagai *common property*. Dimana pengakuan bahwa suatu sumberdaya tertentu merupakan sumberdaya milik bersama (*common property*) merupakan suatu upaya agar masyarakat mendapatkan manfaat jangka panjang, adalah suatu model yang pernah tersebar luas di seluruh dunia (McKean, 1996:5). Akan tetapi semakin meluasnya jumlah pemukiman juga berdampak pada semakin mengecilnya debit air dari mata air yang didistribusikan ke pemukiman-pemukiman tersebut.

Salah satu desa yang memanfaatkan air pegunungan sebagai pasokan utama untuk memenuhi kebutuhan

air bersih rumah tangga adalah Desa Cilayung khususnya RW 11. Sejak awal berdirinya RW 11 telah memanfaatkan mata air dari Gunung Manglayang dimana status lahan hutan tempat mata air tersebut berada dikuasai oleh perhutani sebagai hutan lindung. Namun saat ini, semakin banyak saja masyarakat dari pemukiman-pemukiman baru yang memanfaatkan air dari Gunung Manglayang untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga mereka. Sehingga, sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya penduduk yang memanfaatkan mata air tersebut maka dilakukanlah pengaturan yang disepakati dengan menetapkan model pendistribusian berjangka waktu setiap harinya. Untuk wilayah RW 11 Desa Cilayung setiap harinya mendapat giliran satu jam untuk dialiri air yaitu pada pukul 09.00 pagi.

Pemetaan sosial sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Cilayung namun lebih dititik beratkan untuk mengetahui potensi dan masalah terkait kondisi infrastruktur desa. Informasi dari proses kajian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cilayung tersebut memberikan gambaran bahwa masalah-masalah yang digali dalam penilaian tersebut masih menampilkan aspek kebutuhan sebagai prioritas masyarakat, utamanya adalah masalah fasilitas dan infrastruktur fisik. Adapun mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan bagaimana mendorong masyarakat berdaya dan mandiri tidak terungkap secara spesifik. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan RW 11 berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan diantaranya adalah, fasilitas dan prasarana RW seperti jalan, MCK dan mushola masih sangat terbatas atau belum tersedia, fasilitas pendidikan seperti pengadaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan bangunan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), fasilitas sanitasi, seperti pembangunan sarana air bersih, pembangunan MCK, adanya masalah kesehatan dan Posyandu yang kurang berkembang, kondisi lingkungan yang belum tertata, belum ada penggalian yang optimal untuk pengembangan bidang pariwisata, bagaimana memanfaatkan kawasan hutan lindung untuk kesejahteraan tanpa merusak, tidak ada balai dusun, sistem keamanan yang kurang aktif, masyarakat yang banyak bekerja di luar kampung sebagai tukang bangunan, petani penggarap dan peternak, rata-rata masuk dalam kriteria rumah tangga miskin, masalah sanitasi dan lingkungan, belum adanya program pemberdayaan yang berbasis masyarakat miskin.

Penilaian tersebut memperlihatkan identifikasi yang dilakukan masyarakat Desa Cilayung lebih menyoroti aspek fisik. Berkaitan dengan itu, penulis melihat masih ada persoalan sosial terkait pola perilaku yang dapat dikembangkan secara bersama-sama untuk mengatasi masalah yang ada. Prinsip itulah yang mendasari penulis melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berdasarkan aspek-aspek yang lebih spesifik yang diarahkan untuk menemukan masalah-masalah lainnya yang terjadi di desa

di luar masalah infrastruktur fisik tersebut. Ilmu sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan air bersih tersebut merupakan suatu interaksi sosial yang sangat mungkin berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang lain.

Sehingga untuk meminimalisir benturan tersebut maka penguatan kelembagaan ini menjadi suatu keniscayaan. Karena, meskipun telah ada karang taruna yang selama ini bertanggung jawab untuk mengutip iuran namun kegiatan tersebut belum terlembaga secara baku. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sangat penting artinya atau dengan kata lain masyarakat RW 11 Desa Cilayung harus memiliki lembaga khusus untuk menangani persoalan distribusi air ini. Meskipun lembaga tersebut berada dibawah struktur karang taruna, namun lembaga pengelola air haruslah dikelola dengan baik. Adanya lembaga yang secara memiliki kekhususan dalam mengelola air ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan yang mungkin muncul karena adanya uang yang dikelola. Kedepan jika organisasi pengelola tersebut terbentuk maka akan dikembangkan suatu mekanisme pengawasan dan pengelolaan dana iuran tersebut sehingga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi bagi kelompok pemuda.

Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kelembagaan air di RW 11. Kegiatan ini menyoroti persoalan air yang pasokannya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan pengelola air tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang lainnya. Penguatan kelembagaan pengelola air di RW 11 menjadi penting karena air merupakan kebutuhan vital seluruh masyarakat. Minimnya ketersediaan air juga dapat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat RW 11 Desa Cilayung ini adalah pemetaan sosial dengan menggunakan beberapa teknik PRA. Dipergunakannya pendekatan pemetaan dalam menggali potensi dan masalah yang terjadi di RW 11 Desa Cilayung tersebut karena kegiatan ini dilakukan secara partisipatif. Dalam prosesnya keterlibatan masyarakat RW 11 menjadi sangat penting. Pemetaan sosial atau *social mapping* adalah proses pengumpulan dan penggambaran (*profiling*) data dan informasi, termasuk potensi, kebutuhan dan permasalahan (sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan) masyarakat (Chambers, 1992). Pemetaan sosial adalah pendekatan dan metode yang merupakan bagian dalam metode *participatory rural appraisal* (PRA) yang memungkinkan orang pedesaan membagikan, menyempurnakan, dan menganalisis

pengetahuan tentang kehidupan dan kontraksi, untuk merencanakan dan bertindak. (Chambers, 1992:1).

Pada prinsipnya metode ini dilakukan untuk pemetaan sosial adalah pengumpulan informasi sosial sebanyak-banyaknya bagi pengambilan keputusan dan pengembangan masyarakat yang terbaik pada wilayah tertentu.

Digunakannya teknik-teknik PRA dalam pemetaan sosial ini diyakini dapat memudahkan proses penggalian informasi dan juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat RW 11 dalam menggali dan mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi berdasarkan pengalaman masyarakat sendiri. Penggunaan teknik-teknik PRA ini juga diyakini dapat mendorong munculnya kreativitas-kreativitas langsung dari masyarakat mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dilingkungan mereka.

Data yang diperoleh dari kegiatan ini adalah setiap informasi yang terungkap dari rangkaian proses pemetaan. Kegiatan pemetaan dilakukan dari bulan Agustus-September baik dengan melakukan observasi lokasi, wawancara tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan kelompok perempuan. Selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut akan dilakukan perankingan pada kegiatan diskusi kelompok terfokus. Adapun kegiatan diskusi kelompok terfokus tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan sesepuh RW. Setiap data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan di *cross check* dengan anggota masyarakat yang lain yang bukan merupakan peserta diskusi kelompok terfokus untuk memastikan bahwa persoalan yang dikemukakan tersebut memang merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Selain itu, dengan melakukan diskusi kelompok terfokus tersebut, beragam informasi juga dapat diperoleh dalam satu kesempatan diskusi tersebut.

Beberapa teknik *participatory rural appraisal* (PRA) yang dipergunakan diantaranya adalah, peta sosial dan sumberdaya, tabel perbandingan kondisi ekonomi, kalender musim, kegiatan harian rumah tangga, pemetaan stakeholder, dan *bamboo bridges*. Seluruh teknik yang dipergunakan diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan yang berkembang di RW 11. Peta sosial dan sumberdaya, tabel perbandingan kondisi ekonomi, kalender musim, kegiatan harian rumah tangga, dan pemetaan stakeholder dipergunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan, kondisi masyarakat secara ekonomi, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat berdasarkan musim, aktivitas harian keluarga, dan lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam mendorong kemandirian masyarakat RW 11. Adapun teknik *bamboo bridges* dipergunakan dalam menyusun suatu rencana kegiatan masyarakat melalui penggambaran masalah yang dihadapi, tujuan yang akan dicapai, dan tahapan yang dilalui untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pemetaan partisipatif ini juga diyakini dapat

mengungkap korelasi antara satu persoalan yang terjadi di RW dengan persoalan lainnya. Kegiatan ini sendiri akan dibagi kedalam tiga tahapan kegiatan, pembagian kegiatan ke dalam tiga tahapan tersebut adalah agar konsentrasi dari kegiatan ini sendiri tetap terjaga, selain itu pembagian kegiatan pengabdian ke dalam tiga tahap tersebut dilakukan agar upaya penggambaran kondisi sosial yang ada di RW 11 itu sendiri dapat memberikan hasil yang maksimal. Setelah rangkaian tahapan pemetaan sosial tersebut selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa hasil pemetaan. Dalam proses analisa ini setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemetaan tersebut akan dibandingkan, digabungkan, dan dilihat korelasinya antara satu masalah dengan masalah yang lain. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui apa saja masalah-masalah pokok yang sesungguhnya harus segera dicarikan solusi.

Setelah tahapan analisa tersebut, barulah dilakukan pemaparan pada masyarakat RW 11 (diseminasi informasi), mengenai alternatif-alternatif solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dalam meningkatkan pasokan air bersih ke rumah-rumah warga RW 11. Dengan pemaparan tersebut juga diharapkan ada tambahan informasi serta berkembang opsi-opsi solusi berdasarkan pengetahuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kelangkaan air yang menjadi prioritas di RW 11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cilayung RW 11 ini merupakan wilayah pemekaran yang masih dalam satu dari wilayah RW 03, karena kondisi wilayah yang berjauhan sehingga wilayah ini sempat terisolasi. Berbagai kendala yang dialami masyarakat dari kesulitan mendapat pelayanan pemerintahan desa, bantuan, hingga kurangnya perhatian dari pemerintahan RW 03. Atas dasar semua itu akhirnya warga sepakat melakukan pemekaran wilayah dari RW 03 Desa Cilayung. Pengajuan pemekaran wilayah tersebut disetujui pada tahun 2004. Secara geografis letak RW 11 Desa Cilayung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Batas Wilayah RW 11

Batas Wilayah	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Bagian Utara	Jalan/wilayah Jatinangor	Jatinangor
Bagian selatan	Desa Sindangsari	Jatinangor
Bagian Timur	Desa Cilayung Rw 01-10	Jatinangor
Bagian Barat	Desa Sukasari	Jatinangor

Sumber: Dokumen RPJM Desa Cilayung 2013-2018

Dilihat dari tipe pemukimannya, RW 11 bertipe memanjang mengikuti arah jalan, lokasi RT 01 dan RT 02 berdampingan mengikuti arah wilayah jalan RW 11. RW yang memiliki jumlah penduduk ± 200

jiwa ini keseluruhan warganya adalah pemeluk agama Islam dengan mata pencaharian mayoritas warganya adalah sebagai buruh bangunan bagi laki-laki dan ibu rumah tangga bagi perempuannya, meskipun ada pula perempuan yang bekerja sebagai buruh tani. Di RW 11 terdapat 7 orang perempuan yang memiliki warung rumahan yang berlokasi menyebar di RT 01 dan 02 dan 1 warung nasi ayam yang berada di wilayah RT 01.

Mata pencaharian lain yang dilakukan warga selain menjadi buruh bangunan, adalah sebagai petani penggarap di lahan milik IPDN. Untuk mengelola lahan garapan tersebut warga awalnya memberi uang sewa lahan kepada pihak yang bersangkutan namun pada akhirnya hingga saat ini warga dapat menggunakan lahan garap tersebut secara bebas namun adapun ketentuan dari pihak pemerintah (IPDN) tersebut ialah warga dapat menggunakan lahan untuk bertani tersebut selama tanah tersebut tidak atau belum digunakan maupun dibangun oleh pemerintah. Sehingga warga dapat menggunakan lahan tersebut untuk menanam singkong dan jagung, hasil tani tersebut biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun dijual tergantung pada skala hasil panen. Jika hasil panen banyak maka dapat dijual kepada pihak tertentu yang sudah terbiasa datang ke lahan bertemu dengan petani secara langsung.

Selain sebagai petani penggarap, warga memiliki pekerjaan sebagai buruh industri, beternak, mayoritas warga beternak kambing ataupun ayam namun hal tersebut hanya sebagai hewan peliharaan semata, ada pun sebagai PNS terdapat 1 orang yaitu, sebagai staff di salah satu institusi. Jika dilihat dari aspek budaya masyarakat RW 11 telah mengalami banyak perubahan seperti modernisasi, penambahan jumlah penduduk, tipe bangunan yang sudah semi permanen ataupun permanen. Warga RW 11 juga terus melestarikan tradisi berkesenian seperti reak dan marawis.

Dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas masyarakat berpendidikan SMP sederajat, dan saat ini ada beberapa anggota masyarakat yang berpendidikan tinggi. Adapun kondisi lingkungan RW 11 berdasarkan hasil pengamatan terlihat cukup tertata. Meskipun sampai saat ini diketahui bahwa di lingkungan RW 11 ini tidak tersedia tempat pembuangan sampah, sehingga proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sejauh ini hanya dengan membakar timbunan sampah yang dimiliki oleh masing-masing rumah.

Kondisi sanitasi lingkungan di lingkungan masyarakat desa ini cenderung baik, di mana warga telah memiliki jamban atau MCK pribadi di rumah-rumah warga. Dengan memiliki MCK atau jamban pribadi ini warga telah berupaya menjaga lingkungan dan juga kesehatan warga itu sendiri dengan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Permasalahan air bersih di RW 11

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan beberapa lokasi pemukiman yang jika dibandingkan dengan

beberapa lokasi lainnya jarak RW 11 merupakan yang paling jauh. Sedangkan pipa saluran air yang mengalir ke wilayah RW 11 tersebut juga melewati beberapa lokasi pemukiman, sehingga sangat mungkin terjadi kebocoran atau ada masyarakat di beberapa wilayah pemukiman yang terlewati pipa tersebut yang ikut mengambil manfaat dari aliran air tersebut sehingga debit air yang mengalir menjadi lebih kecil.

Selanjutnya, penggunaan pipa dengan diameter yang kecil juga menjadi kendala, karena meskipun pipa yang kecil tersebut memiliki tekanan air yang lebih besar, namun debit air yang dapat dialirkan ke wilayah RW 11 juga semakin sedikit karena ukuran pipa yang kecil tersebut. Sedangkan jika digunakan pipa dengan diameter yang besar tentunya air yang mengalir juga akan besar.

RW 11 juga tidak memiliki Bak penampungan untuk air yang mengalir dari mata air. Di RW 11 hanya terdapat satu bak kecil yang berfungsi sebagai bak distribusikan air dari mata air ke rumah-rumah masyarakat di yang ada RW 11.



(Sumber: Hasil kegiatan PPM-OKK, 2017)

Gambar 1. Bak Distribusi Air dari mata Air di Lokasi RW 11

Model distribusi seperti ditunjukkan pada gambar tersebut tidak memperlihatkan asas kesamaan dalam pendistribusian air. Pipa yang lebih dekat dengan lubang saluran air dari mata air tentunya akan mendapatkan air lebih banyak dibandingkan dengan pipa yang terletak tidak tepat didepan lubang saluran air dari mata air. Model pendistribusian air seperti ini juga lambat laun akan menimbulkan konflik antar warga karena timbulnya perasaan tidak mendapatkan distribusi secara adil, sedangkan iuran yang dikeluarkan sama. Kondisi distribusi yang tidak merata ini juga akan sangat dirasakan ketika musim kemarau tiba. Jika pada musim hujan, meskipun distribusi air dari sumber mata air tidak besar, namun masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menampung air hujan, sehingga untuk kebutuhan mandi, dan cuci masih bisa didapat dari air hujan tersebut.

Kondisi ekonomi yang sebagian besarnya menengah kebawah menyebabkan masyarakat pasrah dengan kondisi air bersih yang kurang tersebut, karena kebanyakan masyarakat sadar untuk mendapatkan air

yang cukup dan memadai dibutuhkan jaringan pipa yang baik dan hal tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sebagian masyarakat juga memanfaatkan air dari masjid untuk mencukupi kebutuhan harian mereka terutama pada musim kemarau. Bagi masyarakat yang secara ekonomi mampu, biasanya juga membangun bak penampung pribadi atau membeli bak penampung berukuran 1000 liter untuk menyimpan air yang disalurkan dari mata air tersebut.

Sejauh ini diketahui bahwa air dari mata air yang selama ini dimanfaatkan tersebut didistribusikan 2 kali setiap harinya, yaitu pada pagi hari pada pukul 05.00 – 08.00 WIB dan pada pukul 16.00 – 17.00 WIB. Dan setiap bulannya masyarakat di RW 11 harus membayar iuran sebesar 4000 rupiah. Uang iuran tersebut dikumpulkan oleh kader Taruna Karya dan setelah terkumpul diserahkan kepada pengurus air untuk perawatan dan untuk membayar gaji pengurus air tersebut.

Uraian mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut menjadi dasar mengembangkan gagasan-gagasan mengenai model pengelolaan air yang memungkinkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya akan air bersih. Beberapa gagasan tersebut memungkinkan menjadi solusi alternatif yang selanjutnya dianalisa dengan teknik jembatan bambu (*bamboo bridges*). Penggunaan teknik analisa ini diharapkan dapat memudahkan proses analisa bersama karena dengan melakukan visualisasi, beberapa tawaran gagasan tersebut dianalisa secara bersama sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara fisik maupun secara finansial. Beberapa gagasan yang berkembang dalam diskusi tersebut seperti pengadaan sumur bor dalam.

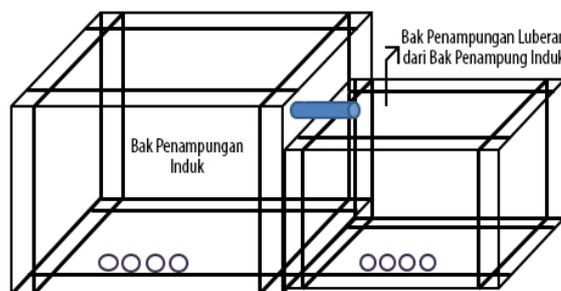
Salah satu gagasan yang saat ini sudah diajukan oleh pemerintah RW 11 ke Desa Cilayung adalah pembuatan sumur bor yang diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan air dari sumber mata air yang ada tersebut. Namun, meskipun ada sumur bor warga RW 11 menyadari bahwa keberadaan sumur bor tersebut tidak sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga. Terutama pada musim kemarau, dimana sumur bor yang juga merupakan sumur resapan juga akan mengalami penurunan debit secara drastis pada musim kemarau, dan tentunya penurunan debit tersebut akan berpengaruh pada berkurangnya pasokan air ke masing-masing warga. Oleh karena itu sumber mata air yang selama ini telah dimanfaatkan tetap menjadi pilihan utama bagi warga.

Selanjutnya, dari kegiatan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan diketahui beberapa fakta menarik terkait dengan mekanisme distribusi air yang selama ini dikembangkan di mata air. Diketahui bahwa setiap dusun hanya mendapatkan jatah pengaliran air selama 1 jam setiap harinya, 30 menit dialirkan di waktu pagi dan 30

menit lagi dialirkan di waktu petang. Diketahui bahwa di hulu mata air terdapat bak penampung air yang sekaligus juga berfungsi sebagai bak distribusi. Pada malam hari, air dari bak penampung tidak dialirkan ke warga sehingga air meluber terbuang secara percuma. Fakta temuan dari proses diskusi kelompok terfokus dan analisa jembatan bambu memunculkan gagasan untuk membuat bak penampung, yang berfungsi menampung air luberan dari bak penampung ketika air tidak didistribusikan pada waktu malam hari.

Hasil diskusi kelompok terfokus dan analisa jembatan bambu, yang dilakukan bersama masyarakat menilai bahwa ide yang ditawarkan tersebut sangat realistis. Diketahui bahwa selama ini masyarakat hanya mengandalkan air yang disalurkan dari bak penampungan yang selama ini telah ada dan dibangun tersebut. Pembangunan bak penampungan ini juga diyakini dapat semakin memperkuat lembaga pengelola air di RW 11. Jika ide ini dapat segera direalisasikan maka lembaga pengelola air juga harus diperkuat. Penguatan tersebut salah satunya adalah dengan mendorong lembaga pengelola air untuk mengakses permodalan.

Penguatan lembaga pengelola air ini menjadi bagian terpenting yang harus dilakukan, karena lembaga pengelola air ini akan bertanggung jawab menjamin cukupnya pasokan air bagi masyarakat sekaligus juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam mengelola sumber mata air secara mandiri. Berikut digambarkan ilustrasi model bak penampungan yang akan dipasang di lokasi sumber mata air tersebut.



(Sumber PPM-OKK 2017)

Gambar 2. Ilustrasi model bak yang akan dibangun, 2017

Dibangunnya bak penampung yang menampung luberan air dari bak penampungan utama ini diyakini dapat mencukupi kebutuhan air bersih khususnya bagi masyarakat di RW 11. Selain dari membangun bak penampung air luberan tersebut, untuk semakin memudahkan pendistribusiannya ke masyarakat maka di lokasi RW 11 juga perlu di bangun satu bak penampungan lagi yang ukuran lebih kecil, setelah air tersebut masuk ke bak penampungan yang ada di RW 11, baru air tersebut didistribusikan menggunakan pipa kerumah-rumah penduduk RW 11. Namun, sebelum dilakukan pembangunan, diperlukan komunikasi dengan RW-RW lain yang merupakan pemanfaat mata air. Beberapa

manfaat dari komunikasi tersebut diantaranya untuk menekan biaya pembangunan bak sehingga dimungkinkan adanya sharing biaya pembangunan bak dengan RW yang berdampingan, atau dengan adanya komunikasi ini juga bisa mendorong adanya pembangunan bak yang dilakukan oleh RW-RW lain sehingga pasokan air untuk wilayah RW sekitar juga semakin baik.

Akan tetapi sebagai salah satu konsekuensi dari adanya perubahan tersebut diperlukan pula penyesuaian-penyesuaian, terutama pada iuran pemakaian air yang harus disesuaikan. Agar penyesuaian tersebut juga mendorong prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan maka di masing-masing rumah penduduk juga harus dipasang meteran air. Dengan adanya meteran air tersebut maka dapat dilihat siapa saja warga yang pemakaiannya banyak, sehingga dengan adanya meteran tersebut juga diyakini dapat mengontrol penggunaan air yang dilakukan oleh masyarakat, karena semakin besar kubikasi air yang dipergunakan maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan setiap rumah tangga tersebut.

Dikembangkannya ide ini juga diyakini akan mendorong masyarakat semakin berkembang, karena jika ternyata air yang ditampung dan didistribusikan oleh warga tersebut melebihi kebutuhan warga, maka pengelola air ditingkat RW juga dapat menjual air tersebut kepada warga lain yang membutuhkan dengan skema ini tentunya lembaga pengelola air juga akan semakin berkembang, sehingga model pengelolaannya tidak jauh berbeda dengan perusahaan air minum yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Kemampuan warga mengelola air ini juga diyakini dapat menjadi nilai lebih bagi karang taruna sehingga dapat membagikan pengalamannya kepada kelompok-kelompok karang taruna lainnya.

Penguatan Lembaga Pengelola Air

Fakta bahwa karang taruna telah berperan dalam mengutip iuran air memperlihatkan bahwa potensi kelembagaan telah ada di RW 11. Hanya saja karena sistem pengelolaan yang selama ini berkembang sangat tradisional maka lembaga pengelola air tidak berfungsi secara maksimal. Akan tetapi jika gagasan untuk membuat bak penampung air luberan tersebut dapat terealisasi maka penguatan kelembagaan Karang Taruna khususnya bagi divisi yang bertugas mengurus dan mengelola air mutlak untuk dilakukan. Termasuk di dalam upaya penguatan lembaga Karang Taruna tersebut adalah dengan membuat aturan-aturan terkait pemanfaatan air. Aturan tersebut sangat diperlukan agar lembaga itu dapat berjalan dinamis dan membuka peluang berkembangnya masyarakat pemanfaat. Beberapa tahapan penguatan yang telah dilakukan selama kegiatan ini diantaranya adalah dengan membentuk lembaga pengelola air ditingkat RW dengan strukturnya yang berada di bawah Karang Taruna.

Selanjutnya, sebagai bagian rangkaian dari upaya penguatan tersebut adalah diskusi kelompok terfokus dengan memetakan potensi dan masalah yang sering

muncul dalam pengelolaan yang telah dilakukan selama ini. Salah satu masalah yang mengemuka adalah susahnya menagih iuran dari masyarakat karena distribusi air yang tidak lancar. Hal ini tentunya menjadi beban bagi pengelola. Oleh karena itu, agar pengelolaan ini dapat berjalan baik maka masyarakat juga diyakinkan untuk dapat membayar lebih dengan jaminan bahwa air yang mereka terima setiap harinya akan mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri.



(Sumber: Kegiatan hasil pengebedian, 2017)

Gambar 3. Penguatan Kelembagaan Pengelola Air

Kegiatan penguatan kelembagaan pengelola air bersih ini telah memberikan perspektif baru bagi karang taruna RW 11 bahwa pengelolaan air yang baik juga dapat mendorong berjalannya roda organisasi dan memungkinkan karang taruna untuk dapat mengembangkan diri karena adanya pemasukan yang dikelola tersebut.

Model pengelolaan air dengan menetapkan insentif ini adalah salah satu upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan air bersih secara jangka panjang. Pemberian insentif ini menjadi sangat penting artinya tidak saja bagi masyarakat yang menjadi pemanfaat tetapi juga bagi pengelola mata air. Dengan menetapkan besaran iuran per-meter kubik yang dipergunakan oleh masyarakat maka dapat menekan penggunaan air secara tidak terkontrol oleh masyarakat. Disisi lain penetapan besaran iuran per meter kubik tersebut juga dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan bagi pengelola mata air. Adanya iuran ini juga diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa mata air yang dipergunakan oleh masyarakat untuk diambil airnya tersebut dapat terus terjaga kondisinya sehingga tidak akan mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Dengan kata lain dapat dikatakan adanya iuran ini juga menjadi salah satu cara untuk menseleksi masyarakat yang dapat mengakses sumber mata air ini, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mata air yang dimanfaatkan tersebut bukanlah sumber daya akses terbuka (*open acces*) yang siapa saja dapat secara bebas memanfaatkannya. Adanya aturan, insentif, dan pengelola ini menunjukkan bahwa sumber mata air tersebut merupakan properti milik bersama (*common property*) yang setiap pemanfaatnya tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam pemanfaatan mata air tersebut (Olstrom, 2008).

Adanya aturan dalam pemanfaatan mata air ini akan menjamin tidak terjadinya kelangkaan atau kerusakan karena adanya salah satu pihak yang memanfaatkan air secara berlebih tanpa berupaya untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya. Jika pemanfaatan tersebut dibiarkan bebas tanpa ada aturan maka keberadaan mata air ini lambat laun juga akan menimbulkan konflik antar sesama pemakainya. Disitulah pentingnya penguatan kelembagaan pengelola air ini, selain untuk memberikan gambaran juga untuk membangun perspektif pengelolaan sumber mata air yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berkembangnya ide untuk membangun bak penampungan yang difungsikan untuk menampung air luberan dari penampungan induk telah memberikan perspektif baru bagi masyarakat RW 11 untuk mendapatkan air bersih secara cukup dan berkelanjutan tanpa harus membangun sumur bor di wilayah RW. Ide ini juga dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan biaya yang besar. Apalagi seluruh jaringan pipa dari sumber mata air kewilayah RW telah terpasang. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak sebesar biaya untuk melakukan pengeboran. Karena dengan membangun bak penampung air luberan tersebut masyarakat tidak perlu membuat jalur perpipaan yang baru hanya tinggal memindahkan jaringan pipa yang telah ada sebelumnya ke bak penampungan yang baru dibuat tersebut.

Ide ini juga telah membuka perspektif berpikir baru bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan air yang ideal sehingga tidak saja dapat memberikan jaminan keberlanjutan pasokan air bersih, tetapi juga

telah memberikan kepastian akan adanya insentif untuk pengelolaan yang memungkinkan karang taruna sebagai pengelola mengembangkan usaha-usaha produktif dari adanya insentif pengelolaan air bersih tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. 1992. *Rural appraisal: rapid, relaxed and participatory*. IDS Discussion Paper 311. <https://www.ids.ac.uk/files/Dp311.pdf>, diakses tanggal 1 Februari 2018.
- _____.tt. *Participatory Rural Appraisal Gambaran Teknik-Teknik Berbuat Bersama Berperan Setara Pengkajian dan Perencanaan Program Bersama masyarakat*. Bandung: Studio Driya Media.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cilayung Tahun 2013-2018. <http://desacilayung.blogspot.co.id/2014/02/rpjmdes-cilayung-2013-2018.html> di akses tanggal 29 Mei 2017.
- Olstrom, Elinor. 2008. *Coping with the tragedies of the common*. Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change Indiana University of Bloomington.
- Mc Kean, Margareth. A. 1996. *Common Property, What Is It, What Is It Good For, and What Makes It Work?*. Forests, Trees and People Programme. Phase II Working Papers. International Forestry Resources and Institutions Research Program, Indiana University, Indiana, U.S.A. FA.